

ANALISIS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA BONTANG

Muhammad Fakhri¹, Budiman²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang dalam menangani bencana serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Kota Bontang sebagai wilayah pesisir memiliki potensi tinggi terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, dan bencana lainnya sehingga peran BPBD menjadi krusial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengevaluasi berbagai aspek kinerja BPBD termasuk produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, yang dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kota Bontang telah menjalankan tugasnya secara optimal dalam hal koordinasi dan penanganan bencana, meskipun masih terdapat beberapa kendala terkait sumber daya dan kapasitas kelembagaan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi peningkatan efektivitas kinerja BPBD dalam menghadapi tantangan kebencanaan di Kota Bontang.

Kata Kunci : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kinerja, bencana.*

Pendahuluan

Kota Bontang terletak pada wilayah 117°23 hingga 117°38 Bujur Timur dan 0°01 hingga 0°12 Lintang Utara. Sebagian besar wilayahnya, sekitar 70,30%, merupakan lautan, sedangkan daratan mencakup 29,70% dari total luas wilayah 497,57 km². Terletak 150 kilometer sebelah utara Samarinda, kota ini tergolong kecil (406,70 km²) dibandingkan daerah lain di Kalimantan Timur. Kota Bontang terletak tepat pada ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan jalan raya internasional hal ini mendukung interaksi kawasan Kota Bontang dengan kawasan intra dan ekstra perkotaan lainnya di tingkat nasional, regional, dan internasional.

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: muhdfkhri02@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Situasi obyektif Kota Bontang saat ini, khususnya dari segi geografis dan geologi, menunjukkan bahwa selain sumber daya energi alam yang melimpah di wilayah Kota Bontang, juga terdapat potensi bencana yang perlu diwaspadai. Menurut data yang diterbitkan BNPB, “Indeks Dampak Bencana Indonesia (IRBI)”, Kota Bontang memiliki skor 150 yang menunjukkan bahwa kota ini memiliki risiko cukup tinggi untuk terjadinya bencana. Artinya tingkat risiko bencana di Kota Bontang harus menjadi perhatian dan prioritas utama bagi pemerintah dan BNPB. Menurut data BPBD Kota Bontang, sepanjang tahun 2023 terdapat 93 kejadian kebakaran dan banjir yang menjadi permasalahan dominan.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Analisis

Analisis menurut Komaruddin (2021:53) adalah suatu kegiatan berpikir yang tujuannya membagi keseluruhan menjadi komponen-komponen agar dapat diketahui ciri-ciri komponen, hubungannya dan fungsi masing-masing komponen. suatu kesatuan yang utuh. Harahap yang dikutip oleh Azwar (2019) mendefinisikan analisis sebagai proses pemecahan atau penguraian unit menjadi unit-unit yang lebih kecil. Wirardi Ramadhani (2020) juga menyatakan bahwa analisis melibatkan kegiatan pemilahan, penguraian, dan pengelompokan sesuatu berdasarkan kriteria tertentu, diikuti dengan upaya mencari makna dan hubungannya masing-masing. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan dimana informasi dibagi dan diuraikan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami dan dijelaskan.

Pengertian Kinerja

Menurut Mangkunegara, kinerja merupakan konsekuensi dari upaya seorang pegawai untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kinerja seseorang ditentukan oleh perpaduan antara bakat, tekad, dan kesempatan individu yang tercermin dari hasil kerjanya. Dalam lingkungan organisasi, kinerja merupakan ukuran keberhasilan dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan (Adriadi & Hariana, 2020).

Indikator Kinerja

Terdapat lima indikator yang diungkapkan Sudarmanto (2014:16) untuk mengukur kinerja organisasi :

1. Produktivitas dapat diukur melalui nilai efektivitas, efisiensi, dan kualitas dari pelayanan publik dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Ini mencakup seberapa baik dan seberapa cepat suatu organisasi atau layanan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan tingkat kualitas yang optimal.
2. Kualitas pelayanan dapat diukur melalui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Tingkat kepuasan ini mencerminkan sejauh mana pelayanan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas dan kualitas suatu

layanan publik.

3. Akuntabilitas dapat diukur melalui kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, merencanakan tujuan, dan menetapkan prioritas pelayanan. Selain itu, juga melibatkan pengembangan program pelayanan publik yang konsisten dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kemampuan organisasi dalam menjalankan langkah-langkah ini menjadi indikator penting dalam menilai tingkat akuntabilitas suatu organisasi terhadap pelayanan publik yang disediakan.
4. Responsibilitas dapat diukur dengan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik telah sesuai dengan prinsip pengelolaan atau kebijakan organisasi yang benar. Evaluasi ini mencakup sejauh mana organisasi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar, kebijakan, serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Tingkat konsistensi dan kepatuhan terhadap pedoman organisasi menjadi indikator penting dalam menilai responsibilitas suatu organisasi.
5. Akuntabilitas dapat diukur dengan sejauh mana kebijakan dan aktivitas organisasi publik berada di bawah pejabat politik yang dipilih secara populer, atau dengan ukuran yang mencerminkan kesesuaian pemberian layanan dengan nilai atau norma sosial eksternal. diselenggarakan oleh pemangku kepentingan

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan pengumpulan pengetahuan yang mendetail dari sumber data dan dilakukan di lingkungan alam. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode deskriptif, sebagaimana dijelaskan oleh Siyato dan Sodik (2015:8). Metode deskriptif berfokus pada penjelasan fenomena dengan detail dan pemisahan dari fenomena lain. Oleh karena itu, riset ini bertujuan untuk memberikan gambaran rinci tentang aktivitas Tubuh Penanggulangan Bencana Wilayah dalam penanganan bencana di Kota Bontang

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang

BPBD Kota Bontang memiliki tugas untuk terus mensosialisasikan keberadaannya sesuai dengan peran dan fungsi yang ditugaskan dalam mengkoordinasikan penanggulangan bencana untuk selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana adalah hal untuk tanggap darurat yang meliputi aspek pra bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana.

Pra bencana merupakan tahapan kesiapsiagaan dan pencegahan untuk menyusun dan melakukan pemantauan terhadap potensi bencana pada suatu wilayah sehingga dampak bencana tersebut dapat berkurang. Saat terjadinya bencana hal yang perlu menjadi perhatian adalah, penyelamatan, evakuasi, penilaian dampak bencana, pendirian posko bencana dan pendirian tempat pengungsian. Setelah bencana, fokus utama adalah pemulihan untuk mengembalikan seluruh aspek

kehidupan masyarakat di wilayah yang terdampak.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015, yang kemudian diubah dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural BPBD, maka kedudukan, tugas pokok, dan fungsi BPBD Kota Bontang adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :

1. Menetapkan pedoman dan arahan untuk menanggulangi bencana yang mencakup perencanaan darurat, pencegahan, rehabilitasi, serta rekonstruksi yang adil dan merata
2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan untuk penanggulangan bencana sesuai peraturan perundang – undangan.
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Melaksanakan penanggulangan bencana di wilayahnya.
5. Melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan baik dalam kondisi normal atau darurat.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran dana dan barang.
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai perundang – undangan.

Fungsi :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan tindakan yang cepat, tepat, efektif, dan efisien.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Program Penanggulangan Bencana BPBD Kota Bontang

Berdasarkan hasil observasi, wawancara kepada narasumber dari BPBD Kota Bontang, didapatkan bahwa BPBD Kota Bontang melakukan beberapa kegiatan untuk penanggulangan bencana sebelum bencana itu terjadi. BPBD Kota Bontang melakukan kegiatan pendekatan berupa sosialisasi pelatihan dan simulasi, melakukan penanggulangan bencana saat bencana terjadi dan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana terjadi.

Salah satu kegiatan sosialisasi BPBD Kota Bontang yang dilakukan adalah kegiatan sosialisasi karhutla bersama masyarakat kelurahan Bontang Lestari yang dilakukan oleh tim BPBD bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Selanjutnya untuk menangani bencana banjir, BPBD Kota Bontang melakukan penanggulangan banjir di kelurahan Api-Api yang dilakukan oleh bidang kedaruratan dan logistic dengan membawa tim lapangan yang terdiri dari coordinator lapangan, personil rescue, personil penumpul dan tim pUSDalops dengan menggunakan armada perahu karet. Program penanggulangan bencana oleh BPBD Kota Bontang yaitu :

1. Pelayanan informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Pelayanan ini dibagi menjadi 2, yaitu :

- 1) Penyusunan kajian risiko bencana kabupaten/kota yang berisi tentang potensi – potensi bencana yang ada di Kota Bontang yang nantinya

dokumen ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam mewujudkan pembangunan Kota Bontang

- 2) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota yang tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana, baik sebelum, saat, atau sesudah bencana terjadi.

2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Pelayanan ini terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu :

- 1) Pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana guna untuk melatih kesiapan masyarakat dan petugas BPBD dalam menghadapi kejadian bencana
- 2) Penyediaan peralatan dan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana guna untuk melengkapi alat perlindungan diri bagi petugas ketika bencana terjadi.
- 3) Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan teknis pelaksanaan program dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu :
 - a) Pemantauan daerah rawan bencana dalam bentuk survey lapangan dengan sasaran wilayah rukun tetangga bersama pengurus RT atau tokoh masyarakat.
 - b) Inspeksi dengan sasaran gedung – gedung sekolah guna melakukan pengamatan terhadap sarana kebencanaan dalam rangka upaya mendukung sekolah aman bencana atau satuan pendidikan aman bencana.
 - c) Pengawasan wisata laut untuk monitoring daerah wisata laut untuk kesiapsiagaan bencana di perairan.

3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Kegiatan pelayanan ini dibagi menjadi 2, yaitu :

- 1) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana sebagai upaya penyelamatan korban bencana. Meliputi pencarian, pertolongan dan evakuasi.
- 2) Penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagai upaya dukungan kepada korban bencana, baik dalam bentuk penyediaan sandang dan pangan, serta penyediaan peralatan kepada petugas untuk kegiatan penyelamatan korban bencana.

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang Produktivitas

Produktivitas adalah hal yang penting dalam pemantauan kinerja dari Sebuah organisasi. Selain itu, produktivitas biasanya diartikan sebagai perbandingan antara input dan output, seperti yang dijelaskan oleh Sudarmanto (2014:16) yang mengutip dari Dwiyanto. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi dapat dipaparkan bahwa ditemukan adanya kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kota Bontang sebagai bentuk pencegahan sebelum, saat, dan pasca bencana yang dilakukan Bersama masyarakat Kota Bontang.

Kualitas Layanan

Kualitas Layanan adalah indikator untuk mengukur kinerja organisasi , kualitas layanan dapat dilihat dari mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Hasil wawancara dengan masyarakat penerima manfaat diatas menunjukkan bahwa kecepatan respon BPBD dalam menangani bencana dikatakan cukup baik karena BPBD mempunyai nomor telepon dan media social aktif yang mudah di akses oleh masyarakat,namun belum semua masyarakat merasa puas dengan kinerja BPBD dalam memberikan rasa aman,tetapi BPBD Kota Bontang selalu berupaya untuk memberikan kepuasan layanan untuk masyarakat dengan terus memperbaiki kualitas layanan kinerja dari BPBD Kota Bontang. Berikut data kualitas layanan kecepatan respon BPBD Kota Bontang dalam menanggulangi bencana :

Kreteria	Penilaian	Keterangan
Ketersediaan informasi kontak	Ada	(0548) 3036524 / 112 (Call Centre Darurat Bontang) Serta Aktif di social media official BPBD Kota Bontang seperti : Instagram : bpbdbontang Facebook : Tim Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang Twitter : bpbdbontang Yang memuat informasi kontak yang lengkap, seperti alamat, nomor telepon, email, dan informasi media social lainnya.
Kemudahan dihubungi	Mudah	Berdasarkan penilaian masyarakat terhadap BPBD Kota Bontang mudah dihubungi melalui telepon yang di share di berbagai media sosial. Selain itu petugas BPBD Kota Bontang responsif dalam menjawab pertanyaan dan memberikan informasi
Jam operasional	24 jam	BPBD Kota Bontang memiliki layanan piket 24 jam untuk menangani situasi darurat. - Masyarakat dapat menghubungi BPBD Kota Bontang kapanpun dibutuhkan.

Tabel 1 Data Kualitas Layanan BPBD Kota Bontang

Berdasarkan tabel data kualitas layanan mengenai kecepatan respon BPBD Kota bontang yang peneliti temukan dilapangan bahwa BPBD Kota Bontang mempunyai nomor telepon official dan aktif di berbagai sosial media seperti facebook guna memudahkan manyarakat menjangkau , mendapatkan informasi , dan menghubungi BPBD Kota Bontang ketika ada keadaan darurat , selain itu BPBD Kota Bontang juga mempunyai jam operasional 24 jam yang dapat meningkatkan rasa aman dan terlindungi korban ketika bencana terjadi yang didukung oleh keahlian tim BPBD dalam menanggulangi bencana sesuai dengan jenis bencana yang terjadi.

Responsivitas

Responsivitas merupakan pengukuran terhadap kemampuan organisasi guna mengenali kebutuhan, menyusun agenda dan prioritas serta mengembangkan program pelayanan publik untuk masyarakat menggunakan aspirasi masyarakat. Terkait dengan Responsivitas dengan indikator kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang untuk mengenali kebutuhan masyarakat, BPBD menyatakan bahwa mereka BPBD memiliki data dan informasi yang cukup tentang kondisi dan kerentanan masyarakat di daerah rawan bencana. Bentuk kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang dalam kemampuan mengenali kebutuhan masyarakat mengumpulkan data dan informasi tentang kondisi dan kerentanan masyarakat di daerah rawan bencana melalui beberapa cara baik pemetaan wilayah yang rentan terhadap berbagai jenis bencana, data historis tentang bencana yang pernah terjadi, survei dan studi lapangan dan bersumber dari masyarakat setempat dalam pengumpulan data melalui kegiatan partisipatif seperti forum diskusi atau pertemuan warga.

Berikut data Responsivitas BPBD Kota Bontang dalam menanggulangi bencana :

Indikator	Keterangan	Penjelasan
Pemetaan daerah rawan bencana	Ada	BPBD Kota Bontang memiliki Peta rawan bencana setiap kelurahan di kota Bontang
Analisis kerentanan	Ada Data	BPBD memiliki data tentang Kerentanan masyarakat terhadap bencana
Pemantauan dan evaluasi	Ada Pemantauan	BPBD Kota Bontang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program kegiatan dalam mengenali potensi bencana
Keterlibatan Masyarakat	Masyarakat Terlibat	BPBD Kota Bontang melibatkan masyarakat dalam kegiatan diskusi untuk mengidentifikasi kebutuhan

Tabel 2 Responsibilitas BPBD Kota Bontang dalam menganali kebutuhan masyarakat

Berdasarkan tabel kemampuan BPBD Kota Bontang dalam mengenali kebutuhan masyarakat di atas yang dibuat dari hasil olahan wawancara dapat dijelaskan dan ditarik kesimpulan bahwa, BPBD Kota Bontang memiliki kemampuan yang baik dalam mengenali kebutuhan masyarakat.

Responsibilitas

Responsibilitas merupakan pelaksanaan kegiatan organisasi yang dilakukan dengan prinsip administrasi yang sesuai dengan kebijakan organisasi. Terkait dengan responsibilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

BPBD Kota Bontang menyatakan bahwa memiliki perencanaan yang matang dan sistematis dalam penanggulangan bencana.

Berikut ini , data tanggung jawab dalam perencanaan matang dan sistematis BPBD Kota Bontang dalam penanggulangan bencana :

Indikator	Keterangan
Perencanaan	
Mempunyai Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD)	BPBD Kota Bontang memiliki dokumen perencanaan yang komprehensif untuk menanggapi berbagai jenis bencana
Dilakukan Pemetaan Risiko Bencana	BPBD Kota Bontang memiliki data dan informasi yang akurat tentang potensi dan risiko bencana di wilayah kota bontang
Dilakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan	Masyarakat Kota Bontang mendapatkan edukasi mengenai pengetahuan dan kesadaran yang tinggi tentang kebencanaan
Pencegahan	
Melakukan Mitigasi	BPBD Kota bontang telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko bencana di wilayah Kota Bontang
Tanggap Darurat	
Dilakukan Koordinasi dan Komando dalam Situasi Darurat	BPBD Kota Bontang mampu memimpin dan mengkoordinasikan berbagai pihak dalam penanganan bencana
Evakuasi dan Penyelamatan Korban Bencana dengan Cepat dan Tepat	BPBD Kota Bontang mampu menyelamatkan korban bencana dengan meminimalisir korban jiwa
Pemulihan Pasca Bencana	
Dilakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	BPBD mampu memulihkan kondisi wilayah dan kehidupan masyarakat pasca bencana.

Tabel 3 Tanggung jawab BPBD Kota Bontang dalam penanggulangan bencana

Berdasarkan data indikator perencanaan matang dan sistematis BPBD Kota Bontang dalam penanggulangan bencana diatas dapat dijelaskan bahwa, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan BPBD mempunyai perencanaan matang dan

sistematis penanggulangan bencana, antara lain dalam tahap Perencanaan BPBD Kota Bontang mempunyai Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) Yang merupakan dokumen komprehensif dan memuat berbagai langkah dan strategi untuk menanggapi berbagai jenis bencana , selanjutnya mempunyai Peta Risiko Bencana yang merupakan langkah penting untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rawan bencana dan jenis bencana yang berpotensi terjadi , melakukan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Kebencanaan yang penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang potensi bencana dan cara-cara penanggulangannya, pada proses pencegahan BPBD Kota Bontang melakukan Mitigasi Bencana yang merupakan upaya untuk mengurangi risiko bencana , Selanjutnya pada tahap Tanggap Darurat BPBD Kota Bontang melakukan Koordinasi dan Komando dalam Situasi Darurat yang efektif dan sangat penting dalam situasi darurat untuk memastikan semua pihak bekerja sama dengan baik dan terarah

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan BPBD atas kegiatan atau program yang dilakukan ke masyarakat. Terkait dengan Akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah , BPBD Kota Bontang menyatakan bahwa memiliki beberapa bentuk pertanggung jawaban atas kegiatan dan program yang dilakukan kepada masyarakat. Berikut ini , tabel Akuntabilitas bentuk pertanggung jawaban oleh BPBD Kota Bontang :

Bentuk Akuntabilitas	Tujuan	Saasaran
Laporan Kinerja	Memberikan informasi tentang kegiatan dan program BPBD	Walikota,DPRD, dan Masyarakat
Publikasi dan Diseminasi Informasi	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kebencanaan	Masyarakat
Forum Konsultasi Publik	Mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat	Masyarakat
Pengaduan Masyarakat	Menerima laporan dan keluhan terkait dengan kinerja BPBD Kota Bontang	Masyarakat
Audit Kinerja	Memastikan kinerja BPBD sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	Internal BPBD

Tabel 4 Akuntabilitas bentuk pertanggung jawaban oleh BPBD Kota Bontang

Berdasarkan data akuntabilitas bentuk pertanggung jawaban BPBD Kota Bontang diatas dapat dijelaskan bahwa, BPBD Kota Bontang telah menunjukkan komitmennya dalam menjalankan akuntabilitas kinerja dengan melakukan berbagai

bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari penyusunan laporan kinerja, disusun tahunan yang memuat informasi tentang kegiatan dan program yang telah dilaksanakan, capaian kinerja, serta kendala dan hambatan yang dihadapi. Selanjutnya melakukan Publikasi dan Diseminasi Informasi, BPBD secara rutin mempublikasikan informasi tentang kegiatan dan programnya melalui website, media sosial, dan media massa lainnya dan BPBD juga mengadakan kegiatan diseminasi informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kebencanaan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang memiliki peran strategis dalam penanggulangan bencana di wilayahnya. Dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, BPBD Kota Bontang melaksanakan berbagai program untuk menghadapi bencana, mulai dari tahap pra-bencana, tanggap bencana, hingga pasca-bencana.

Berdasarkan hasil penelitian, BPBD Kota Bontang telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, dan simulasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta menanggulangi bencana banjir dan kebakaran.

Program-program yang dijalankan meliputi:

1. Pelayanan informasi rawan bencana melalui penyusunan kajian risiko dan edukasi masyarakat.
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang mencakup pelatihan, penyediaan peralatan, dan penguatan kapasitas kawasan.
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, termasuk pencarian, pertolongan, dan penyediaan logistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kota Bontang mampu menjalankan tugasnya secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Namun, dengan tingginya tingkat risiko bencana di Kota Bontang, BPBD perlu terus meningkatkan kapasitasnya melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Penanganan bencana yang responsif, akuntabel, dan efektif akan sangat penting untuk melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak bencana di masa depan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana di Kota Bontang, peneliti berupaya memberikan saran-saran terkait hasil penelitian ini untuk membantu BPBD Kota Bontang dalam meningkatkan kinerjanya, sebagai berikut:

1. Peningkatan **sosialisasi dan edukasi** kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana, termasuk simulasi dan pelatihan secara rutin, serta pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam penanggulangan bencana.
2. Peningkatan **kualitas layanan** kepada korban bencana, seperti penyediaan tempat pengungsian yang aman dan nyaman, bantuan yang memadai, serta komunikasi yang efektif dan akurat.

3. **Meningkatkan responsivitas** kinerja melalui pembaruan peta risiko bencana secara berkala, pemanfaatan teknologi modern seperti drone dan SIG, serta membangun kemitraan dengan LSM untuk meningkatkan sumber daya dan keahlian.
4. Meningkatkan **akuntabilitas** kinerja melalui pembuatan platform online terintegrasi yang memuat laporan kinerja, dokumentasi kegiatan, informasi program, dan forum diskusi publik.

Daftar Pustaka

Undang - Undang

- Bontang, P. K. (2023). *Peraturan Daerah Kota Bontang*. Kota Bontang: Pemerintah Kota Bontang.
- Bontang, P. K. (2023). *Peraturan Daerah Kota Bontang No.1*. Kota Bontang: Pemerintah Kota Bontang.
- Indonesia, P. (2007). *Undang – undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana*. Pemerintah Indonesia.
- Indonesia, P. (2023). *Undang – Undang Republik Indonesia Pasal 18 No 24 tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Derah*. Pemerintah Indonesia.

Buku

- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Komaruddin. (2001). *Ensilopedia Manajemen Edisi Ke 5*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Komaruddin. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiwa.
- Kusumasari. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Mahsun, & Muhammad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: FE UGM.
- Moloeng, & J, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Noor, & Juliansyah. (2011). *Metodologi penelitian : skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nurjanah, & dkk. (2013). *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Pasalong, H. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabet.
- Prawirosentono, S. (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media.
- Sudarmanto. (2014). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Dokumen - Dokumen

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG Wali Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur . (n.d.).

Ir. K. M. Arsyad, M. Sc. (2017). *PELATIHAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI TINGKAT JURU“ MODUL PENANGGULANGAN BENCANA*.

Khaerunnisa, A. (2022). *Analisis Kebijakan Program Peta Rawan Bencana Di Dalam Mitigasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman.

Jurnal

Azwar. (2019). Analisis Kualitas Layanan Sistem Manajemen Aparatur Responsif Terpadu Menggunakan Metode Servqual. *Prosiding Seminar Nasional*, 1 - 5.

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 35.

Ferdiansyah, Sugiarti, C., & Atthahara, H. (2020). Analisis Penanggulangan Benacana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. 70 - 71.

Illanisa, N., Zulkarnaen, W., & Suwana, A. (2019). PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN SEKOLAH DASAR ISLAM BINAR

INDONESIA BANDUNG. *SEMAR (Sain Ekonomi Manajemen & Akuntansi Rivi)*, 19.

Sadat, A. (2016). EFEKTIVITAS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENGURANGAN RESIKO

BENCANADIKOTA BAUBAU. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 1 - 20.

Sari, A. A., Sabilla, A. A., & Hertati, D. (2020). PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MANAJEMEN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN GRESIK. *Syntax Idea*, 21 - 35.

Simarmata, P. (2017). Parihutatua Sinarmata. 2017. “ Hukum Zona Ekonomi Eksklusif dan Hak Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia –ISSN : 2541-0849e-ISSN :*

2548-1398Vol. 2, No 2, 108 - 123.

Syafril, S., & Sulandari, S. (2019). ANALISIS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA SEMARANG.

Journal Of Public Policy And Management Review, 6 - 9. Sari, A. A., Sabilla, A.

A., & Hertati, D. (2020). PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MANAJEMEN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN GRESIK. *Syntax Idea*, 21 - 35.

Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam(Fakhri)
Simarmata, P. (2017). Parihututua Sinarmata. 2017. “ Hukum Zona Ekonomi
Eksklusif dan Hak Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia –ISSN : 2541-
0849e-ISSN : 2548- 1398Vol. 2, No 2, 108 - 123.*